

ATLAS

PROVINSI JAMBI



UNTUK : SD, SMP, SMU DAN UMUM

Disusun Oleh :

M. Grivan Magner , Ir. Mohd. Zuhdi, M.Sc , Faisal Aziz. RH

ATLAS

PROVINSI JAMBI



UNTUK : SD, SMP, SMU DAN UMUM

Disusun Oleh :

M. Grivan Magner , Ir. Mohd. Zuhdi, M.Sc , Faisal Aziz. RH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan ke-hadirat Allah S.W.T., karena atas izin-Nya dan Rahmat-Nya jualah akhirnya Buku Atlas Provinsi Jambi ini telah selesai Kami susun.

Atlas ini disusun berdasarkan data terbaru dengan adanya beberapa penambahan jumlah kabupaten / kota seiring adanya pemekaran wilayah di beberapa wilayah kabupaten dalam Provinsi Jambi di era reformasi ini.

Tujuan Atlas ini disusun selain untuk membantu siswa dan segenap lapisan masyarakat Jambi ataupun di luar Jambi akan pengetahuan kondisi geografis Provinsi Jambi terkini, juga Kami berharap supaya Atlas ini berguna untuk memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan akan khasanah budaya Provinsi Jambi pada khususnya.

Harapan Kami semoga penyajian Atlas Provinsi Jambi ini dapat mencapai sasaran dan bermanfaat bagi para pengguna khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Selanjutnya sejalan dengan itu, dengan hati dan tangan terbuka Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan Atlas ini.

Jambi, Juni 2009

Penyusun

ATLAS PROVINSI JAMBI

Edisi Pertama

Penyusun	: M. Grivan Magner, Ir. Mohd. Zuhdi, M.Sc., Faisal Aziz. RH
Tata Letak	: M. Grivan Magner
Perancang Sampul / Design Graphis	: K & R Created

* Perhitungan luas seluruh daerah di Provinsi Jambi dilakukan menggunakan software SIG (Sistem Informasi Geografik)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2	Logo Kabupaten Bungo	37
Daftar Isi	3	Peta Kabupaten Bungo	38
Pancasila	4	Photo Bupati Kabupaten Bungo	39
Photo Presiden RI	5	Photo Wakil Bupati Kabupaten Bungo	40
Presiden RI	6	Logo Kab. Tanjung Jabung Timur	41
Photo Wakil Presiden RI	9	Peta Kab. Tanjung Jabung Timur	42
Wakil Presiden RI	10	Photo Bupati Kab. Tanjung Jabung Timur	43
Logo Provinsi Jambi	13	Photo Wakil Bupati Kab. Tanjung Jabung Timur ..	44
Peta Provinsi Jambi	14	Logo Kab. Tanjung Jabung Barat	45
Photo Gubernur Provinsi Jambi	15	Peta Kab. Tanjung Jabung Barat	46
Photo Wakil Gubernur Provinsi Jambi	16	Photo Bupati Kab. Tanjung Jabung Barat ..	47
Selayang Provinsi Jambi	17	Photo Wakil Bupati Kab. Tanjung Jabung Barat	48
Logo Kota Jambi	21	Logo Kabupaten Sarolangun	49
Peta Kota Jambi	22	Peta Kabupaten Sarolangun	50
Photo Walikota Jambi	23	Photo Bupati Kabupaten Sarolangun	51
Photo Wakil Walikota Jambi	24	Photo Wakil Bupati Kab. Sarolangun	52
Logo Kabupaten Muaro Jambi	25	Logo Kabupaten Merangin	53
Peta Kabupaten Muaro Jambi	26	Peta Kabupaten Merangin	54
Photo Bupati Kabupaten Muaro Jambi	27	Photo Bupati Kabupaten Merangin	55
Photo Wakil Bupati Kab. Muaro Jambi	28	Photo Wakil Bupati Kabupaten Merangin ..	56
Logo Kabupaten Batanghari	29	Logo Kabupaten Kerinci	57
Peta Kabupaten Batanghari	30	Peta Kabupaten Kerinci	58
Photo Bupati Kabupaten Batang Hari	31	Photo Bupati Kabupaten Kerinci	59
Photo Wakil Bupati Kab. Batang Hari	32	Photo Wakil Bupati Kabupaten Kerinci	60
Logo Kabupaten Tebo	33	Peta Kota Sungai Penuh	61
Peta Kabupaten Tebo	34	Photo Pjs. Walikota Sungai Penuh	62
Photo Bupati Kabupaten Tebo	35	Pembagian Wilayah NKRI	63-72
Photo Wakil Bupati Kabupaten Tebo	36		



PANCASILA

1.

KETUHANAN YANG MAHA ESA

2.

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

3.

PERSATUAN INDONESIA

4.

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN /
PERWAKILAN

5.

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA



DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

1. Presiden Pertama RI

DR. Ir. H. Soekarno

DR. Ir. H. Soekarno yang kerap disebut Bung Karno adalah proklamator kemerdekaan RI, dwi tunggal bersama Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901.

Tanggal 4 Juli 1927 Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan berhasil merumuskan sendi perjuangannya untuk membela kepentingan rakyat kecil atau disebut rakyat marhaen sehingga ajarannya kemudian disebut Marhaenisme.

Bung Karno menyetujui adanya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang inti suratnya adalah ada pelimpahan kewenangan dari Presiden, Pangti ABRI, dan Pemimpin Besar Revolusi kepada Mayjen Soeharto Pangkostrad, untuk mengambil langkah guna pemulihan keamanan dan menjaga ketertiban, mengamankan wibawa Pemimpin Besar Revolusi, dan ajaran-ajarannya.

Minggu, tanggal 21 Juni 1970 Bung Karno meninggal dunia di RSPAD Jakarta dan dikebumikan di Blitar.

2. Presiden Kedua RI

Jenderal (Purn) TNI. H. M. Soeharto

Jenderal (Purn) TNI. H. M. Soeharto lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Menjadi anggota TNI pada tanggal 5 Oktober 1945.

Pada saat Indonesia merebut Irian Barat Pak Harto dipercaya sebagai Panglima Mandala / Pembebasan Irian Barat (1962-1963). Selanjutnya menjadi Panglima Komando Strategi AD (Pangkostrad 1965/1966). Pada tanggal 1 Juli Pak Harto memperoleh pangkat Jenderal dan menjadi Panglima AD.

Pak Harto mendapatkan mandat sebagai Pejabat Presiden RI pada sidang MPRS tahun 1967 hingga kelak memerintah RI berturut - turut selama 32 tahun. Atas desakan dari beberapa pihak termasuk dari kelompok mahasiswa, maka Presiden Soeharto kemudian meletakkan jabatan sebagai Presiden RI tanggal 21 Mei 1998. Pak Harto meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2008.

3. Presiden Ketiga RI

Prof. DR. Ing. H. B.J. Habibie

Prof. DR. Ing. H. B.J. Habibie lahir di Pare-pare, Sulawesi Selatan, 25 Juni

1936. Menyelesaikan kuliah di Bandung, dilanjutkan ke Technische Hochschule, Achen, Jerman dan lulus cumlaude untuk jurusan konstruksi pesawat terbang.

Pada tahun 1960 diperoleh gelar Diploma Ing. dan mendapatkan gelar Doctor Ing. dengan predikat summa cumlaude di tahun 1965. Selanjutnya pernah menduduki jabatan Wakil Presiden dan Direktur Teknologi Masserschmitt Boelkow Blohm, sebuah industri pesawat terbang di Hamburg, Jerman.

Ditahun 1974 atas keberhasilannya di dunia pendidikan dan juga di bidang teknologi kedirgantaraan itu kemudian pak Habibie dipanggil Presiden Soeharto pulang ke Indonesia. Selanjutnya ia menduduki beberapa jabatan penting diantaranya sebagai Menteri Riset dan Teknologi, sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi, mengembangkan perusahaan Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN), PT. PAL Surabaya, dan Wakil Presiden RI.

Tanggal 21 Mei 1998 Pak Habibie menerima limpahan wewenang dari Presiden Soeharto. Dimasa pemerintahannya provinsi ke-27 Timor Timur lepas merdeka lewat jajak pendapat yang diawasi PBB, menjadi Republik Timor Leste yang hingga kini masih menyisakan masalah nasional, seperti pengungsi, asset RI yang ada disana, kelompok pemuda yang prointegrasi yang menolak kemerdekaan Timor Leste.

4. Presiden Keempat RI KH. Abdurrahman Wahid

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) lahir di Jombang, Jawa Timur, 14 Agustus 1940. Pernah mengenyam pendidikan di Al-Azhar Kairo, Mesir, dan juga cukup lama studi di Irak. Gus Dur yang merupakan anggota MPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), namun diajukan sebagai calon presiden oleh Poros Tengah yakni partai-partai yang memiliki wakil-wakil di MPR yang tidak dominan seperti PAN, PPP, PBB, PK, dll.

Tokoh yang dikenal sebagai Tokoh NU dan budayawan ini dilantik oleh MPR menjadi Presiden keempat RI pada tanggal 20 Oktober 1999. Dalam fase pemerintahan Gus Dur, susunan kabinet ia beri nama Kabinet Persatuan Nasional. Perubahan nyata dalam pemerintahannya adalah penambahan jumlah provinsi di Indonesia menjadi 32 buah sesuai dengan tuntutan daerah, dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, lewat alokasi dana umum dan khusus.

Setelah dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus DPR, dan terbukti presiden banyak melakukan penyimpangan GBHN, maka kemudian diagendakan untuk menggelar Sidang Istimewa MPR di bulan Juli 2001, selanjutnya MPR mengangkat Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI kelima sampai akhir jabatan 2004. Dan untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang lowong terpilihlah ketua Umum PPP Dr. H. Hamzah Haz menjadi Wakil Presiden RI setelah dilakukan pemilihan langsung oleh MPR.

5. Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri

Nama lengkap Presiden RI kelima adalah Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1946. Beliau yang dilantik menjadi Presiden RI Ke-5 pada tanggal 23 Juli 2001 menggantikan KH. Abdurrahman Wahid yang mandatnya ditarik oleh MPR pada Sidang Istimewa MPD-2001, merupakan putri kedua dari mendiang Presiden RI pertama Dr. Ir. H. Soekarno dengan ibu Fatmawati. Pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran Bandung, juga pernah kuliah di Fakultas Psikologi UI, walau semuanya tidak sampai selesai.

Sebagai perempuan pertama yang menjabat Presiden RI dan sebagai seorang nasionalis sejati beliau konsisten tentang upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diharapkan juga menggambarkan wawasan gender Bangsa Indonesia yang sehat dan terbuka. Dari aspek demokratisasi, orientasi pada akuntabilitas dan Akseptabilitas serta keberpihakannya pada rakyat kecil, sebagai ukuran seorang tokoh politik dapat tampil memimpin bangsa.

6. Presiden Keenam RI Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhono

Presiden RI ke-6 ini lebih populer dengan singkatan SBY. Lahir di Pacitan, Jawa Timur, pada tanggal 9 September 1949. Terpilihnya beliau merupakan babak baru dalam ketatanegaraan RI karena beliau merupakan satu-satunya presiden yang mulai dipilih secara langsung oleh rakyat. SBY menyelesaikan AKABRI ditahun 1973 dengan pangkat letnan dua. Pada waktu pendidikan militer di luar negeri beliau sempat belajar di bidang manajemen di University Missouri AS, dan meraih gelar Master of Arts.

Karir militernya dijalannya mulai dari Komandan Peleton di Brigif Linud 17 Kujang I Kostrad, Promosi Komandan Kompi sampai dengan Komandan Batalion dan pernah dipercaya sebagai Komandan Kontingen Perdamaian PBB di Bosnia Herzegovina dengan pangkat Brigadir Jenderal. Pengalaman tugas Teritorial sudah dijalannya mulai dari Komandan Korem 072 / Pamungkas Yogyakarta, Kasdam Jaya, sampai dengan Panglima Kodam II / Sriwijaya dengan pangkat Mayor Jenderal.

Berkarir sebagai prajurit profesional selama 27 tahun dengan pangkat terakhir Jenderal dan memegang tidak kurang dari 13 tanda jasa baik dari pemerintahan RI maupun negara asing dan lembaga internasional. Karir di bidang pemerintahan antara lain : Anggota DPR Fraksi Utusan Golongan (1999-2004), Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) tahun 2000-2004.



H. M. JUSUF KALLA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

WAKIL - WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

1. Drs. Mohammad Hatta

Drs. Mohammad Hatta atau Bung Hatta dilahirkan di Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau yang pernah belajar di sekolah tinggi ekonomi di Belanda ini merupakan Ketua PNI Baru di Bandung. Juga ikut memproklamasikan Proklamasi Kemerdekaan RI sebagai dwi tunggal pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama Bung Karno. Maka pada tanggal 18 Agustus 1945 resmilah beliau diangkat menjadi Wakil Presiden RI yang pertama. Tanggal 1 Desember 1956 beliau mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Dikarenakan konsep-konsepnya tentang ekonomi yang selanjutnya dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945 maka beliau kemudian juga mendapat sebutan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Tanah Kusir Jakarta.

2. Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912. Beliau yang pernah mengikuti kuliah di Rijkuniversiteit, Belanda ini merupakan salah satu Raja Jawa yang menentang penjajah Belanda secara terang-terangan, dan mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Beliau menduduki jabatan sebagai menteri kabinet sejak tahun 1946. Tahun 1966 menjadi Menteri Utama dibidang ekonomi, keuangan, dan industri, dan di tahun 1973 beliau diangkat menjadi Wakil Presiden RI yang ke-2. Pada tanggal 2 Oktober 1988 Sri Sultan Hamengkubuwono IX meninggal dunia di Rumah Sakit George Washington University Medical Centre, Amerika Serikat dan dimakamkan di Imogiri, Yogyakarta.

3. H. Adam Malik

Adam Malik yang kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara tanggal 22 Juli 1917 ini dikenal sebagai Tokoh Wartawan terkemuka. Beliau mendirikan Kantor Berita Antara di tahun 1973, dan beliau juga aktif di dunia politik, hingga kelak mendirikan Partai Rakyat dan Partai Murba (1946 - 1958), menjadi anggota parlemen dan DPA, pernah pula menjadi duta besar di Uni Soviet dan Polandia (1959). Dan beberapa jabatan lain yang pernah didudukinya diantaranya sebagai Ketua Delegasi Indonesia - Belanda (1962), Menteri Ekonomi (1965), Wakil Perdana Menteri II / Menteri Luar Negeri ad Interim dan Menteri Luar Negeri RI, Ketua Majelis Umum PBB ke-26 di New York, dan menjadi Wakil Presiden RI ke-3 pada tanggal 23 Maret 1978 (1978 - 1983). H. Adam Malik meninggal dunia pada tanggal 5 September 1984 di Bandung.

4. Jenderal (Purn) Umar Wirahadikusumah

Jenderal (Purn) Umar Wirahadikusumah lahir pada tanggal 1 Oktober 1924 di Situraja, Sumedang, Jawa Barat. Berbekal dari pendidikan ketentaraan yang didapatnya sejak zaman Jepang di Seinendojo, Tangerang (Jawa Barat) dan Peta (Pembela Tanah Air) di Bogor, Jawa Barat, maka beliau membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Cicalengka. Jabatan sebagai Kepala Staf Resimen X Tasikmalaya berturut - turut didudukinya, Pengawal Staf Divisi Siliwangi, Komandan Resimen X / Galuh Divisi Siliwangi, Komandan Pusat Kavaleri, Pangdam XV / Pattimura, Maluku. Kemudian menjadi Komandan Resimen Tempur Siliwangi, Komdan KMKB (Komando Militer Kota Besar) Jakarta Raya, dan selanjutnya menjadi Pangdam V / Jaya. Dalam penumpasan G 30 S / PKI beliau juga sangat berperan sehingga kemudian beliau diangkat menjadi Pangkostrad. Di tahun 1969 - 1973 ia menjabat sebagai Kasad, dan sampai dengan tahun 1983 ia bertugas di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Pada tahun 1983-1988 beliau menjadi Wakil Presiden RI yang ke-4. Tanggal 21 Maret 2003 Jenderal (Purn) Umar Wirahadikusumah wafat dan dimakamkan di TMP, Kalibata.

5. Letjen (Purn) Sudharmono, S.H.

Letjen (Purn) Sudharmono, S.H. lahir tanggal 12 Maret 1927 di Cerme, Gresik, Jawa Timur. Beliau yang menyelesaikan pendidikan tahun 1962 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini, pernah menjadi jaksa tentara merangkap perwira staf Penguasa Perang Tertinggi, juga pernah menjabat Menteri Sekretaris Kabinet merangkap Sekretaris Dewan Stabilitas Ekonomi, dan Ketua Umum Golkar (Golongan Karya). Jabatan Wakil Presiden RI ke-5 dijabatnya periode 1988 - 1993. Letjen (Purn) Sudharmono, S.H. wafat pada Januari 2006.

6. Jenderal (Purn) Try Sutrisno

Jenderal (Purn) Try Sutrisno lahir di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 15 November 1935. Tahun 1955 Jenderal (Purn) Try Sutrisno masuk Akademi Militer Angkatan Darat (Atekad). Kemudian berperan dalam operasi pemberantasan DI / TII di Aceh tahun 1957, Pembebasan Irian Barat tahun 1962, penumpasan G 30 S / PKI. Beliau juga pernah menjabat beberapa jabatan penting hingga menjadi ajudan Presiden Soeharto (1974 - 1978), menjadi Panglima ABRI. Beliau terpilih menjadi Wakil Presiden RI ke-6 periode 1993 - 1998.

7. Prof. DR. Ing. H. B.J. Habibie

Prof. DR. Ing. H. B.J. Habibie merupakan Wakil Presiden RI yang ke-7 periode 1998-2003. Beliau menduduki jabatan Wakil Presiden hanya berjalan sekitar 2 bulan, karena kemudian atas desakan mundur dari rakyat atas Presiden Soeharto maka kemudian beliau menggantikan posisi Presiden Soeharto atas jabatannya yang kala itu masih sebagai Presiden RI. Maka dengan demikian pada tanggal 21 Mei 1998 B.J. Habibie kemudian menjadi Presiden RI yang ke-3..

8. Megawati Soekarnoputri

Megawati Soekarnoputri yang mempunyai nama asli Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri ini dilahirkan di Yogyakarta, 23 Januari 1946. Setelah menjadi Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang kelak melalui musyawarah nasional luar biasa bulan Desember 1993 di Jakarta menjelang Pemilu 1999 berganti menjadi PDI Perjuangan (PDIP) karier politik beliau mencuat dan menjadi pemenang dalam pemilu saat itu. Maka kemenangan meraih suara ini kemudian mengantarkannya memperoleh kursi jabatan Wakil Presiden RI yang ke-8 periode 1999-2004.

9. Prof. Dr. H. Hamzah Haz

Prof. Dr. H. Hamzah Haz merupakan pria kelahiran Ketapang, Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 15 Februari 1940. Beliau pernah menekuni karier sebagai wartawan di Pontianak, kuliah di Akademi Koperasi Negara Yogyakarta, kuliah di Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Perusahaan di Universitas Tanjungpura Pontianak, mewakili angkatan 66 dan duduk di DPRD Pontianak. kariernya terus melejit hingga membawanya ke jenjang jabatan Menteri, diantaranya pernah menjadi Menteri Negara Investasi / Kepala BKPM di masa pemerintahan Prof. DR. Ing. H. B.J. Habibie, Menko Kesra dan Taskin di masa pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid, dan terpilih menjadi Wakil Presiden RI ke-9 periode 1999-2004 menggantikan Megawati Soekarnoputri yang kala itu naik menjadi Presiden RI ke-8.

10. H. M. Jusuf Kalla

H. M. Jusuf Kalla mengawali babak baru dalam sistem ketatanegaraan di negara RI karena terpilih sebagai Wakil Presiden RI ke-10 yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu. H. M. Jusuf Kalla dilahirkan di Watampone, Sulawesi Tengah pada tanggal 15 Mei 1942. Beliau menyelesaikan SD di Watampone, SMP dan SMA di Makasar, Sarjana Ekonomi di Universitas Hasanuddin Makasar, dan studi bisnis di Prancis.

Sebagai pengusaha di PT. Bukaka beliau berhasil menciptakan dan memproduksi ramp way (belalai gajah) peralatan bandara untuk membantu penumpang turun dari pesawat yang kemudian produk yang dihasilkan PT. Bukaka ini mampu menguasai pasar terbesar di dunia. Dalam karier politik beliau pernah menjadi anggota MPR utusan Golkar maupun daerah selama lebih kurang 5 periode (1982-2001) dan di bidang pemerintahan antara lain : Menteri Perindustrian dan Perdagangan (1999-2000) merangkap Kabulog di masa kabinet Gus Dur, dan Menteri Koordinator Bidang Kesra pada Kabinet Gotong Royong (2001-2004) dimasa kabinet Megawati. Dalam berorganisasi beliau juga sangat berpengalaman, adapun organisasi yang pernah diikutinya antara lain : Ketua Kadin Sulsel, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, dan Ketua Alumni Universitas Hasanuddin. H. M. Jusuf Kalla terpilih sebagai wakil presiden periode 2004-2009 berpasangan dengan Presiden SBY.



PROVINSI JAMBI

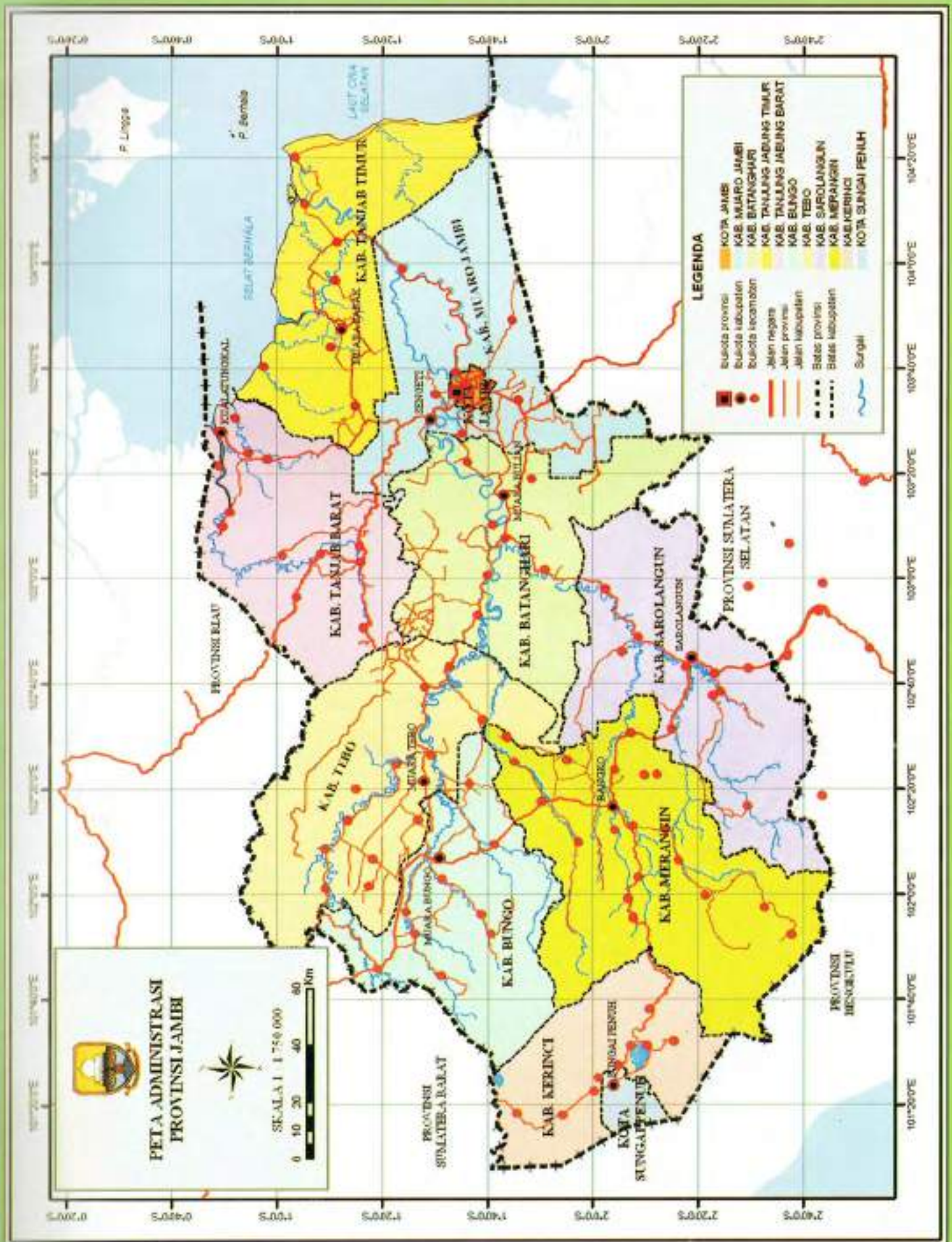
GUBERNUR JAMBI DARI MASA KE MASA

1.	DJAMNIN DT BAGINDO	1956 - 1957
2.	M. YUSUF SINGEDEKANE	1958 - 1966
3.	H. A. MANAP	1966 - 1968
4.	R.M. NUR ATMADI BRATA	1968 - 1974
5.	H. DJAMALUDDIN TAMBUNAN, SH	1974 - 1979
6.	H. EDDY SABARA (Pjs)	1979 - 1979
7.	H. MASJCUN SOFWAN, SH	1979 - 1989
8.	DRS. H. ABDURRAHMAN SAYOETI	1989 - 1999
9.	H. ZULKIFLI NURDIN	1999 - 2005
10.	DR. IR. SUDARSONO H.MA.SH (Pjs)	2005 - 2005
11.	H. ZULKIFLI NURDIN	2005 - 2010

WAKIL GUBERNUR JAMBI

1.	H. M. MUSA	1994 - 1998
2.	H. UTENG SURYADIATNA	1998 - 2004
3.	DRS. H. HASIP KALIMUDDIN SYAM, MM	1998 - 2005
4.	DRS. H. ANTONY ZEDRA ABIDIN, MM	2005 - 2010

PROVINSI JAMBI





H. ZULKIFLI NURDIN
GUBERNUR PROVINSI JAMBI



DRS. H. ANTONI Z. ABIDIN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI

SELAYANG PROVINSI JAMBI



Provinsi Jambi

PROVINSI JAMBI

Provinsi Jambi berdiri pada tanggal 2 Juli 1958 berdasarkan UU No. 61 Tahun 1958 dengan luas + 54.436 Km².

Lambang daerah di Provinsi Jambi berupa perisai segi lima yang didalamnya terdapat gambar masjid, keris, gong, dan bertuliskan *Sepucuk Jambi Sembilan Lurah*

Adapun setiap gambar yang terdapat dalam logo Provinsi Jambi masing-masing mempunyai arti sebagai berikut : *Perisai segi lima* melambangkan jiwa dan semangat Pancasila, *Masjid* melambangkan ketaatan beragama rakyat Jambi, *Keris* sebagai simbol kepahlawanan dan keberanian, *Gong* sebagai simbol jiwa musyawarah.

JUMLAH KECAMATAN DAN LUAS KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAMBI

No.	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KEC.	LUAS (Ha)	LUAS (Km2)
1.	Kota Jambi	8	17.352	174
2.	Kab. Muaro Jambi	8	531.271	5.313
3.	Kab. Batanghari	8	557.422	5.574
4.	Kab. Tanjung Jabung Barat	13	500.505	5.005
5.	Kab. Tanjung Jabung Timur	11	501.354	5.014
6.	Kab. Bungo	17	470.978	4.710
7.	Kab. Tebo	12	623.422	6.234
8.	Kab. Merangin	24	745.367	7.454
9.	Kab. Sarolangun	10	595.218	5.952
10.	Kab. Kerinci	12	342.183	3.422
11.	Kota Sungai Penuh	5	35.895	359
J U M L A H		128		

Keterangan :

- *) Luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat hanya merupakan luas daratan dan tidak termasuk luas laut, sedangkan luas Kabupaten Kerinci termasuk luas danau.
- **) Perhitungan luas dilakukan menggunakan software SIG (Sistem Informasi Geografik).



Kota Jambi

LUAS KECAMATAN DI KOTA JAMBI

No.	KECAMATAN	LUAS (Ha)
1.	Kec. Telanaipura	2.647
2.	Kec. Kotabaru	6.503
3.	Kec. Jambi Selatan	2.884
4.	Kec. Jelutung	776
5.	Kec. Pasar Jambi	169
6.	Kec. Jambi Timur	1.773
7.	Kec. Pelayangan	1.038
8.	Kec. Danau Teluk	1.562
J U M L A H		17.352



Kabupaten Muaro Jambi

LUAS KEC. DI KAB. MUARO JAMBI

No.	KECAMATAN	LUAS (Ha)
1.	Kec. Sekernan	59.777
2.	Kec. Jambi Luar Kota	28.216
3.	Kec. Mestong	47.870
4.	Kec. Sungai Bahar	53.231
5.	Kec. Kumpoh Ulu	38.955
6.	Kec. Kumpoh	194.573
7.	Kec. Maro Sebo	44.163
8.	Kec. Sungai Gelam	64.486
J U M L A H		531.271



Kabupaten Batang Hari

LUAS KEC. DI KAB. BATANGHARI

No.	KECAMATAN	LUAS (Ha)
1.	Kec. Muara Bulian	40.246
2.	Kec. Muara Tembesi	40.321
3.	Kec. Mersam	76.990
4.	Kec. Marosebo Ulu	86.251
5.	Kec. Batin XXIV	87.619
6.	Kec. Pemayung	97.316
7.	Kec. Muaro Sebo Ilir	12.392
8.	Kec. Bajubang	116.287
J U M L A H		557.422



Kab. Tanjung Jabung Barat

LUAS KEC. DI KAB. TANJAB. BARAT

No.	KECAMATAN	LUAS (Ha)
1.	Kec. Tungkal Ilir	7.950
2.	Kec. Pengabuan	44.043
3.	Kec. Betara	55.960
4.	Kec. Tungkal Ulu	37.330
5.	Kec. Merlung	31.207
6.	Kec. Batang Asam	106.079
7.	Kec. Bram Itam	31.440
8.	Kec. Kuala Betara	18.253
9.	Kec. Muara papalik	34.094
10.	Kec. Renah Mendaluh	44.812
11.	Kec. Seberang Kota	10.892
12.	Kec. Senyerang	42.536
13.	Kec. Tebing Tinggi	35.909
J U M L A H		500.505



Kab. Tanjung Jabung Timur

LUAS KEC. DI KAB. TANJAB. TIMUR

No.	KECAMATAN	LUAS (Ha)
1.	Kec. Muara Sabak Barat	27.496
2.	Kec. Muara Sabak Timur	40.844
3.	Kec. Nipah Panjang	27.439
4.	Kec. Rantau Rasau	19.478
5.	Kec. Sadu	63.737
6.	Kec. Kuala Jambi	12.279
7.	Kec. Mendahara	53.119
8.	Kec. Mendahara Ulu	59.777
9.	Kec. Geragai	54.311
10.	Kec. Dendang	27.878
11.	Kec. Berbak	114.996
J U M L A H		501.354



Kabupaten Bungo

LUAS KEC. DI KAB. BUNGO

No.	KECAMATAN	LUAS (Ha)
1.	Kec. Pasar Bungo	809
2.	Kec. Bungo Dani	2.893
3.	Kec. Rimbo Tengah	11.402
4.	Kec. Tanah Sepenggall	11.828
5.	Kec. Tanah Sepenggall Lintas	6.624
6.	Kec. Rantau Pandan	25.650
7.	Kec. Muko-muko Batin VII	26.624
8.	Kec. Batin III Ulu	36.924
9.	Kec. Tanah Tumbuh	49.505
10.	Kec. Pelepat	103.278
11.	Kec. Pelepat Ilir	43.880
12.	Kec. Batin III Babeko	17.469
13.	Kec. Batin III	8.566
14.	Kec. Jujuhan	27.262
15.	Kec. Jujuhan Ilir	20.353
16.	Kec. Limbur Lubuk Mengkuang	60.128
17.	Kec. Batin III Pelayang	17.783
JUMLAH		470.978



Kabupaten Tebo

LUAS KEC. DI KAB. TEBO

No.	KECAMATAN	LUAS (Ha)
1.	Kec. Tebo Tengah	66.738
2.	Kec. Tebo Ilir	35.052
3.	Kec. Tebo Ulu	23.937
4.	Kec. VII Koto	53.282
5.	Kec. Rimbo Bujang	37.270
6.	Kec. Sumay	113.232
7.	Kec. Tengah Ilir	58.550
8.	Kec. Muaro Tabir	69.911
9.	Kec. Rimbo Ulu	34.582
10.	Kec. Rimbo Ilir	19.252
11.	Kec. VII Koto Ilir	52.689
12.	Kec. Serai Serumpun	58.927
JUMLAH		623.422



Kabupaten Merangin

LUAS KEC. DI KAB. MERANGIN

No.	KECAMATAN	LUAS (Ha)
1.	Kec. Bangko	16.741
2.	Kec. Sungai Manau	29.904
3.	Kec. Pamenang	34.141
4.	Kec. Tabir	33.874
5.	Kec. Muaro Siau	57.580
6.	Kec. Jangkat	92.440
7.	Kec. Lembah Masurai	71.035
8.	Kec. Tabir Selatan	17.726
9.	Kec. Tabir Ulu	20.824
10.	Kec. Bangko Barat	19.205
11.	Kec. Batang Masumai	11.543
12.	Kec. Margo Tabir	12.093
13.	Kec. Nalo Tantan	19.655
14.	Kec. Pamenang Barat	19.863
15.	Kec. Pamenang Selatan	17.791
16.	Kec. Pangkalan Jambu	40.283
17.	Kec. Renah Pamenang	9.642
18.	Kec. Renah Pemberap	28.040
19.	Kec. Sungai Tenang	60.438
20.	Kec. Tabir Barat	71.407
21.	Kec. Tabir Ilir	15.637
22.	Kec. Tabir Lintas	10.548
23.	Kec. Tabir Timur	8.501
24.	Kec. Tiang Pumpung	26.456
JUMLAH		745.367



Kabupaten Sarolangun

LUAS KEC. DI KAB. SAROLANGUN

No.	KECAMATAN	LUAS (Ha)
1.	Kec. Sarolangun	28.164
2.	Kec. Batin VIII	36.557
3.	Kec. Pelawan	32.121
4.	Kec. Batang Asai	98.320
5.	Kec. Limun	82.271
6.	Kec. Pauh	75.014
7.	Kec. Air Hitam	63.046
8.	Kec. Mandiingin	117.931
9.	Kec. Singkut	24.073
10.	Kec. Cermin Nan Gedang	37.721
J U M L A H		595.218



Kabupaten Kerinci

LUAS KEC. DI KAB. KERINCI

No.	KECAMATAN	LUAS (Ha)
1.	Kec. Sitinjau Laut	5.835
3.	Kec. Keliling Danau	34.537
5.	Kec. Gunung Raya	55.347
6.	Kec. Batang Merangin	53.979
7.	Kec. Danau Kerinci	23.609
8.	Kec. Air Hangat	22.753
9.	Kec. Air Hangat Timur	18.592
10.	Kec. Gunung Kerinci	34.532
11.	Kec. Kayu Aro	32.028
12.	Kec. Depati Tujuh	2.896
13.	Kec. Gunung Tujuh	16.206
14.	Kec. Siulak	41.869
J U M L A H		342.183

LUAS KEC. DI KOTA SUNGAI PENUH

No.	KECAMATAN	LUAS (Ha)
1.	Kec. Hamparan Rawang	1.320
2.	Kec. Kumun Debai	14.677
3.	Kec. Pesisir Bukit	1.820
4.	Kec. Sungai Penuh	16.964
5.	Kec. Tanah Kampung	1.114
J U M L A H		35.895

Kota Sungai Penuh



KOTA JAMBI

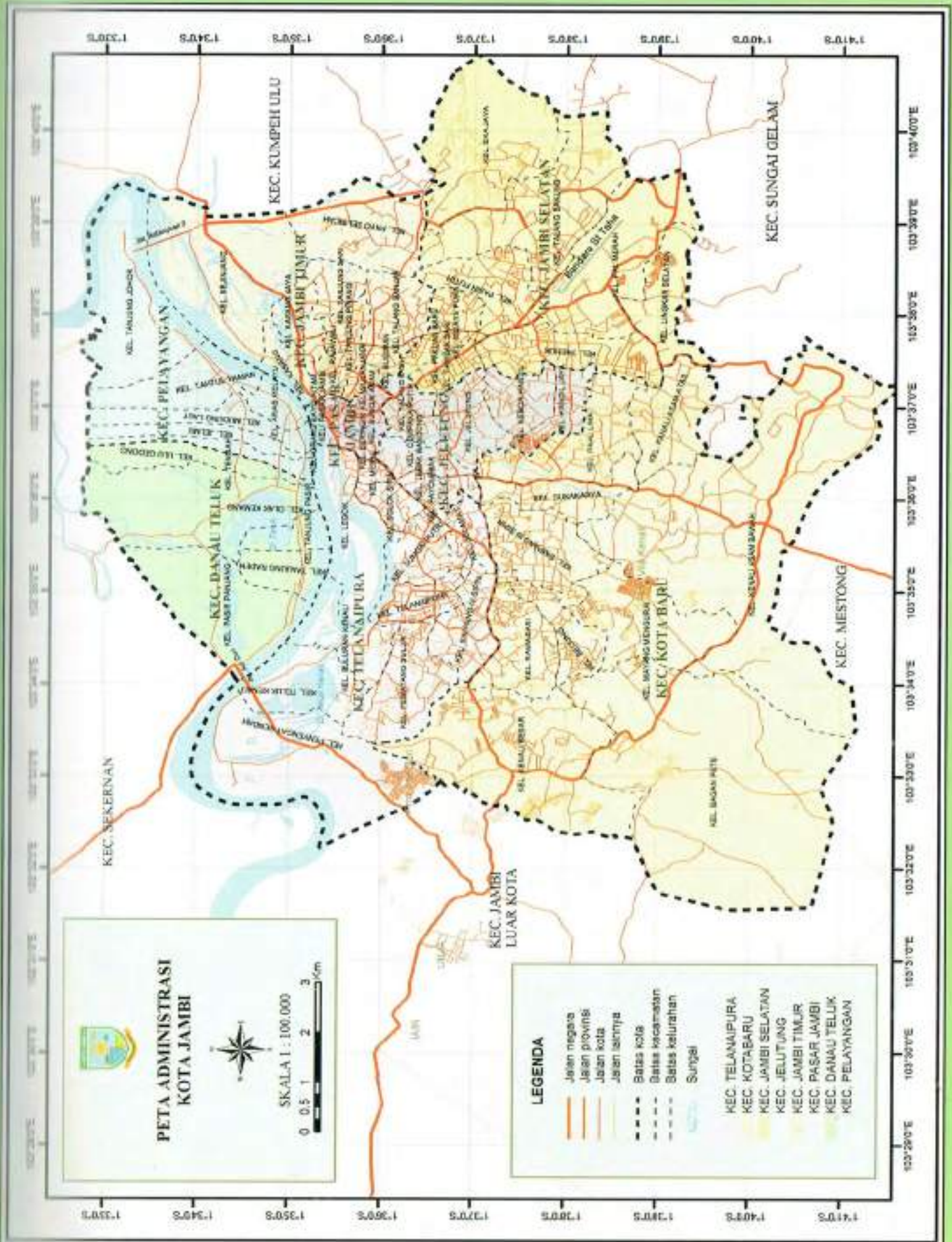
WALIKOTA JAMBI
DARI MASA KE MASA

1.	Makalam	1946 - 1948
2.	Muhammad Kamil	1948 - 1950
3.	Rd. Sudarsono	1950 - 1966
4.	Drs. Hasan Basri Durin	1966 - 1968
5.	Drs. Z. Muchtar Daeng Mangguna	1968 - 1972
6.	H. Zainir Haviz, BA	1972 - 1983
7.	Drs. H. Azhari. DS	1983 - 1993
8.	Drs. H. Muhammad Sabki	1993 - 1998
9.	Drs. H. Arifien Manap, MM	1998 - 2008
10.	Dr. H. R. Bambang Priyanto	2008 - 2013

WAKIL WALIKOTA JAMBI

1.	H. Turimin, SE	1998 - 2008
2.	Sum Indra, SE, M.Si	2008 - 2013

KOTA JAMBI





Dr. H.R. BAMBANG PRIYANTO
WALIKOTA JAMBI



SUM INDRA, SE, M.Si
WAKIL WALIKOTA JAMBI



KABUPATEN MUARO JAMBI

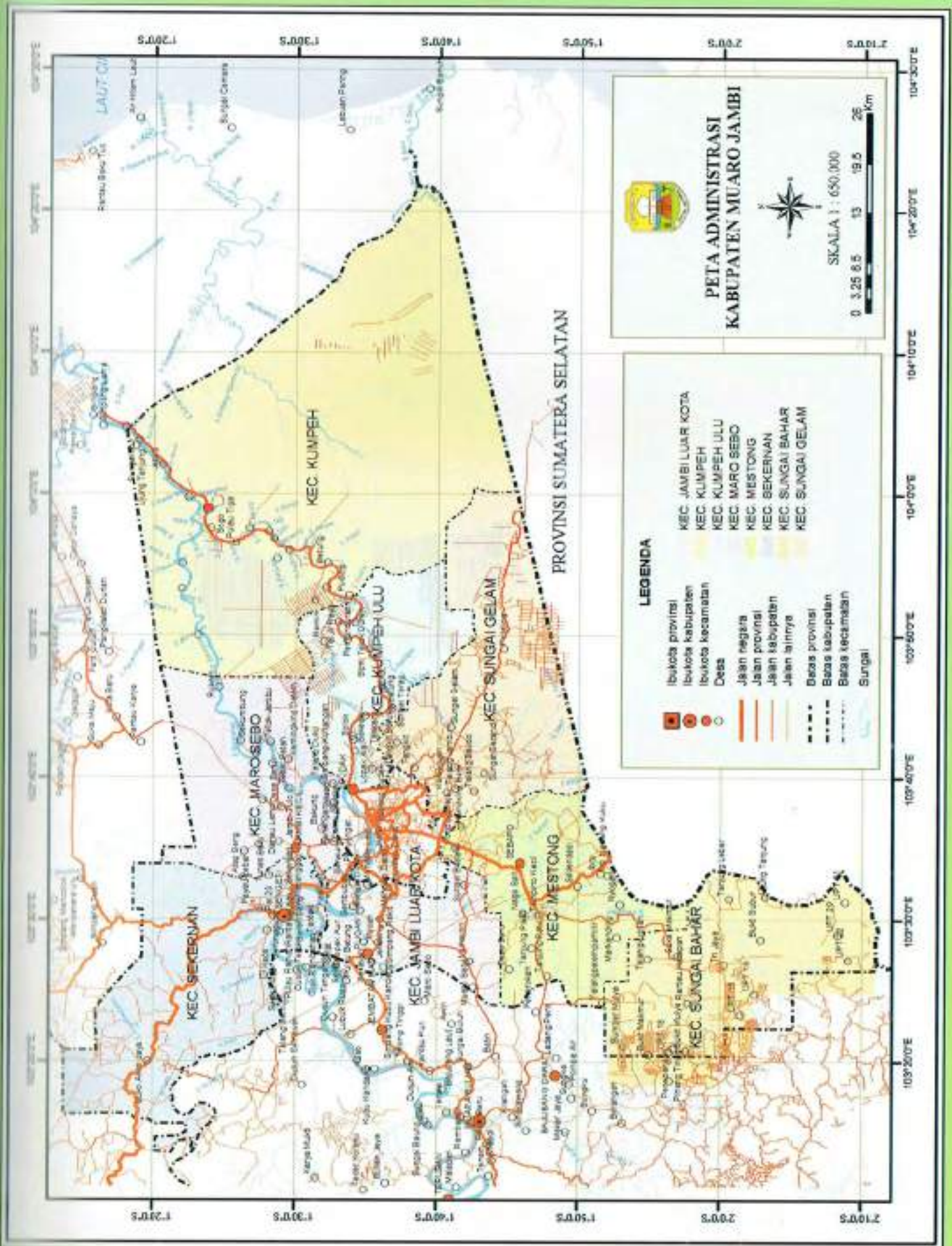
BUPATI KABUPATEN MUARO JAMBI

H. Buhanuddin Mahir, SH

WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARO JAMBI

H. Muchtar Muis, MM

KABUPATEN MUARO JAMBI





H. BURHANUDDIN MAHIR, SH
BUPATI KABUPATEN MUARO JAMBI



Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM
WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARO JAMBI



KABUPATEN BATANGHARI

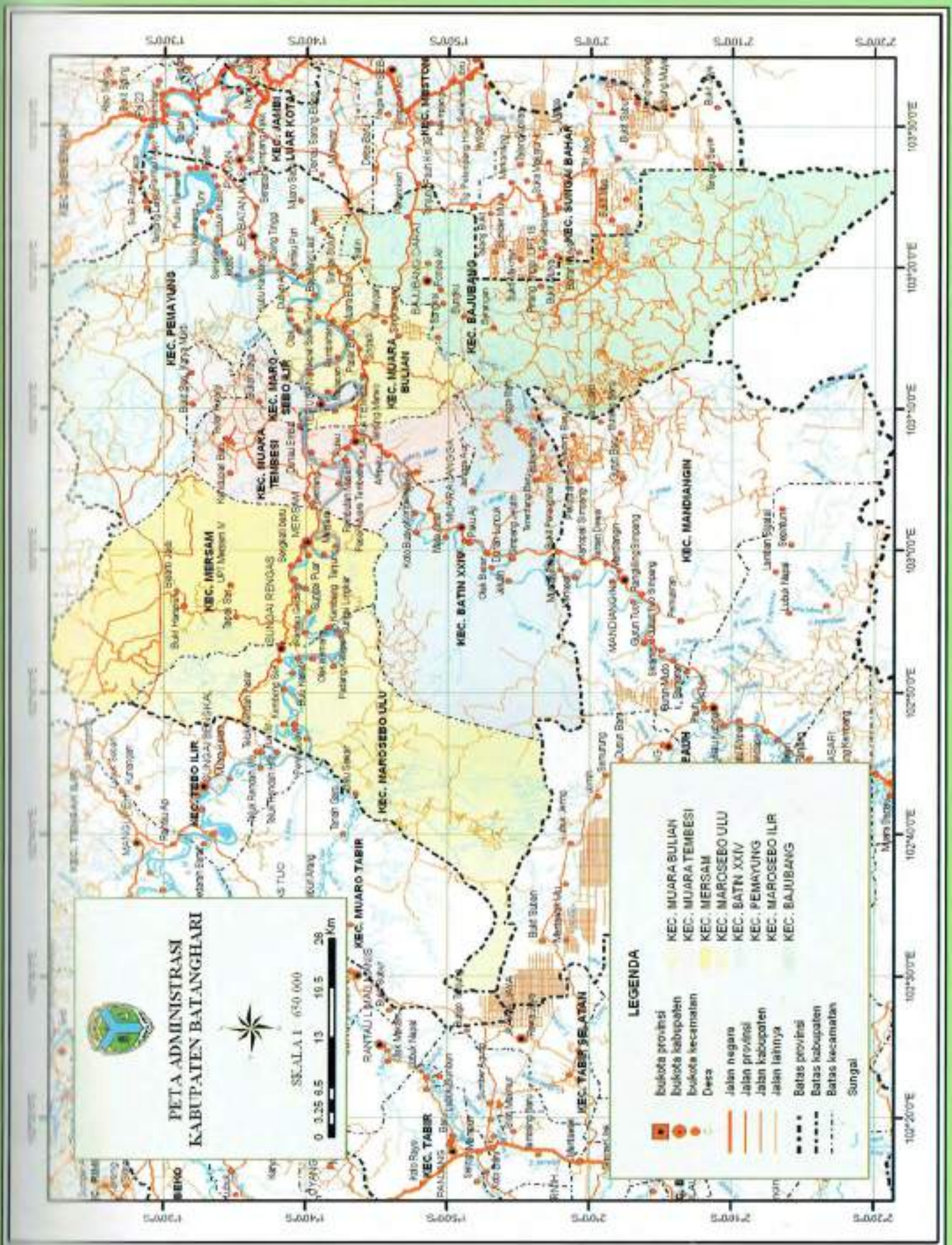
BUPATI KABUPATEN BATANGHARI

Ir. Syahirsyah. SY

WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANGHARI

Ardian Faisal

KABUPATEN BATANGHARI





Ir. SYAHIRSAH. SY
BUPATI KABUPATEN BATANG HARI



ARDIAN FAISAL
WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI



KABUPATEN TEBO

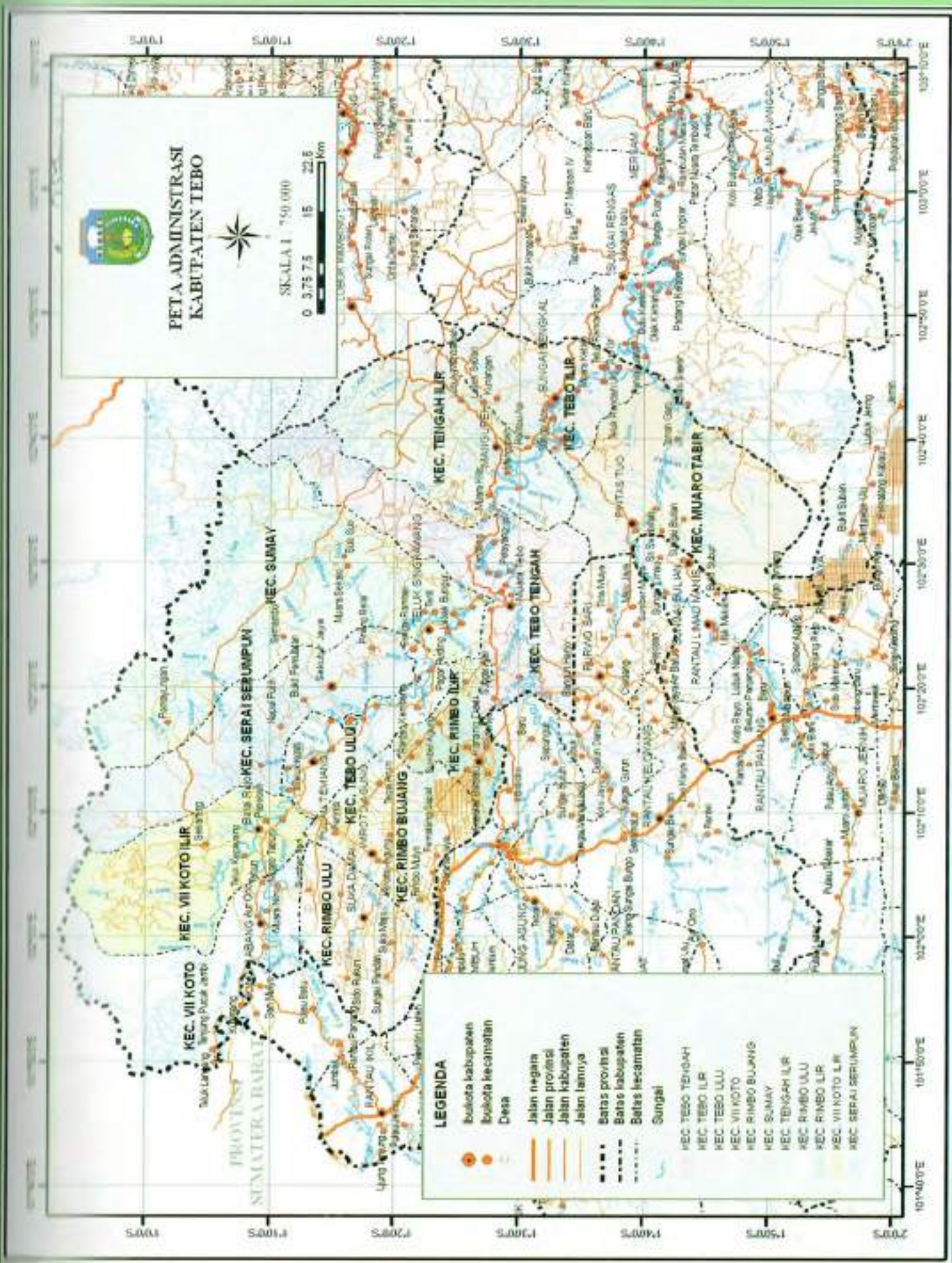
BUPATI KABUPATEN TEBO

Drs. H. A. Madjid Mu'az, MM

WAKIL BUPATI KABUPATEN TEBO

Sukandar, S.Kom

KABUPATEN TEBO





DRS. H. A. MADJID MU'AZ, MM
BUPATI KABUPATEN TEBO



SUKANDAR, S.Kom
WAKIL BUPATI KABUPATEN TEBO



KABUPATEN BUNGO

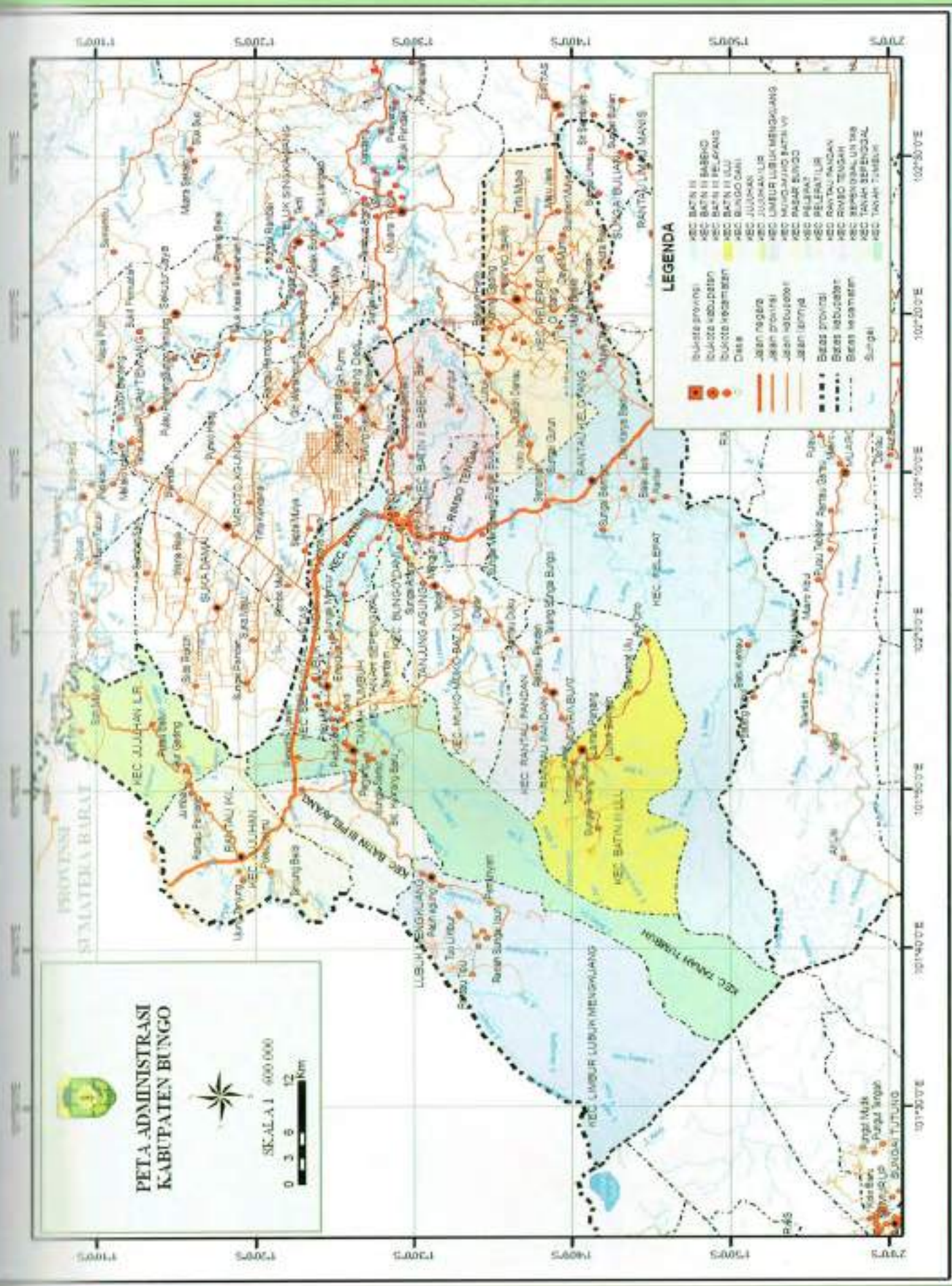
BUPATI KABUPATEN BUNGO

Dr. H. Zulfikar Achmad, MBA

WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO

H. Sudirman Zaini, SH, MH

KABUPATEN BUNGO





Dr. H. ZULFIKAR ACHMAD, MBA
BUPATI KABUPATEN BUNGO



H. SUDIRMAN ZAINI, SH, MH
WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO



KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

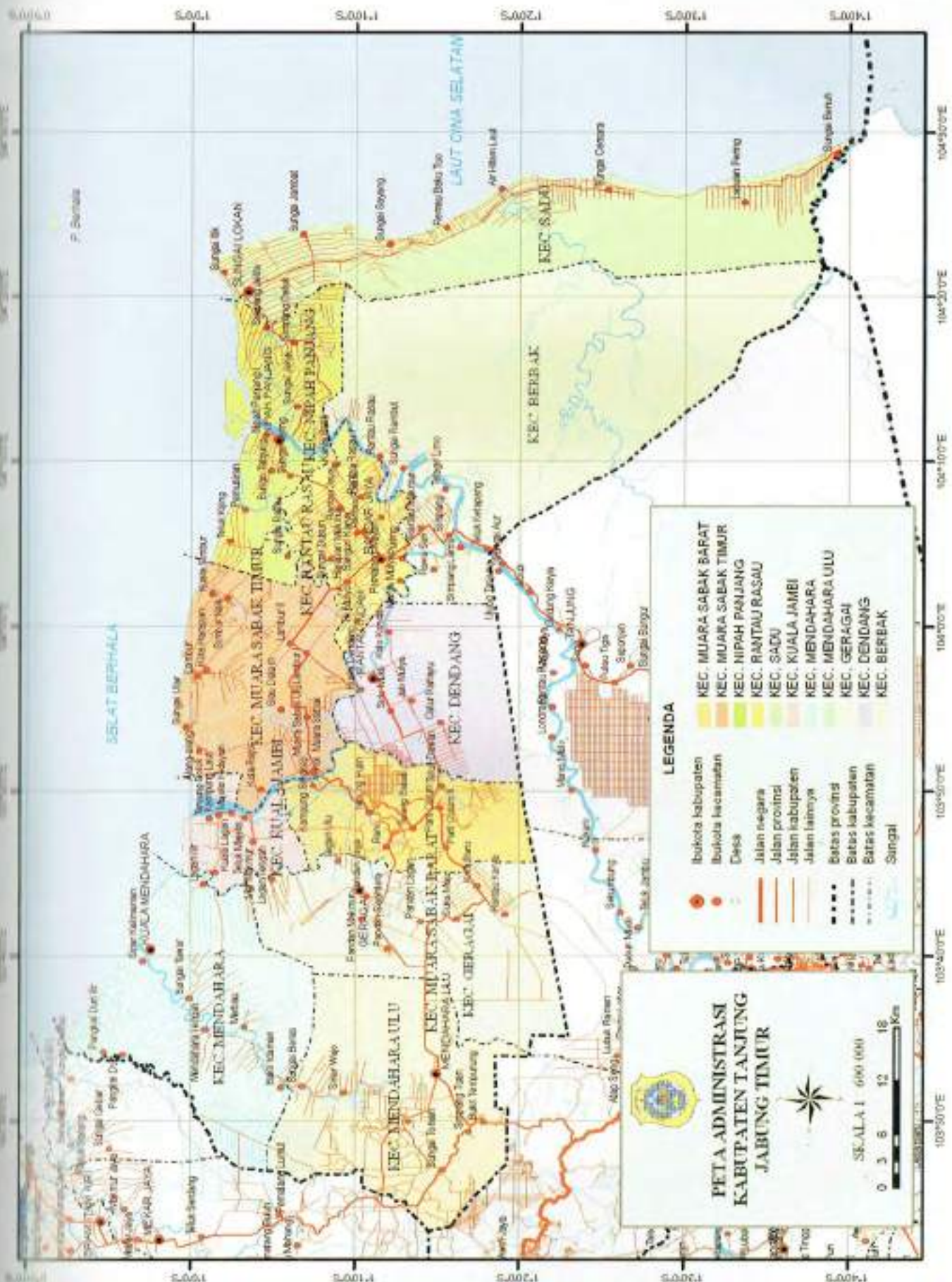
BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. H. Abdullah Hich, MM

WAKIL BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

M. Juber

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



LEGENDA

- ibu kota kabupaten
- ibu kota kecamatan
- Desa
- Jalan negara
- Jalan provinsi
- Jalan kabupaten
- Jalan lainnya
- Batas provinsi
- Batas kabupaten
- Batas kecamatan
- Sungai

**PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR**

SKALA 1 : 600 000

0 3 6 12 18 Km



DRS. H. ABDULLAH HIGH, MM
BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



M. JUBER, S.Ag
WAKIL BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DR. H. Safrial, M.S.

WAKIL BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

H. M. Yamin, SH



DR. H. SAFRIAL, M.S
BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. M. YAMIN, SH

WAKIL BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



KABUPATEN SAROLANGUN

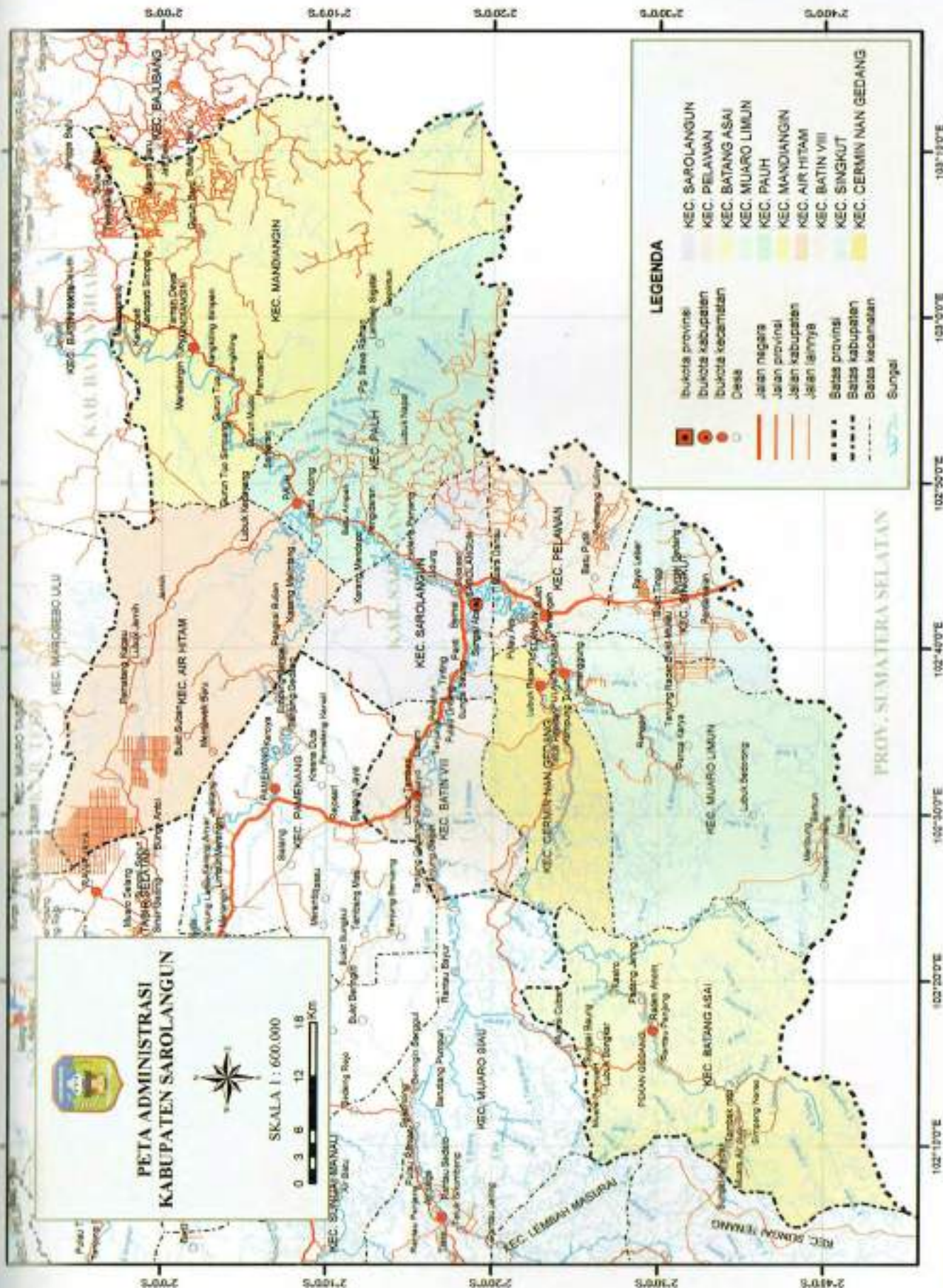
BUPATI KABUPATEN SAROLANGUN

Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M.

WAKIL BUPATI KABUPATEN SAROLANGUN

Drs. H. Cek Indra

KABUPATEN SAROLANGUN





Drs. H. HASAN BASRI AGUS, MM
BUPATI KABUPATEN SAROLANGUN



DRS. H. CEK ENDRA
WAKIL BUPATI KABUPATEN SAROLANGUN



KABUPATEN MERANGIN

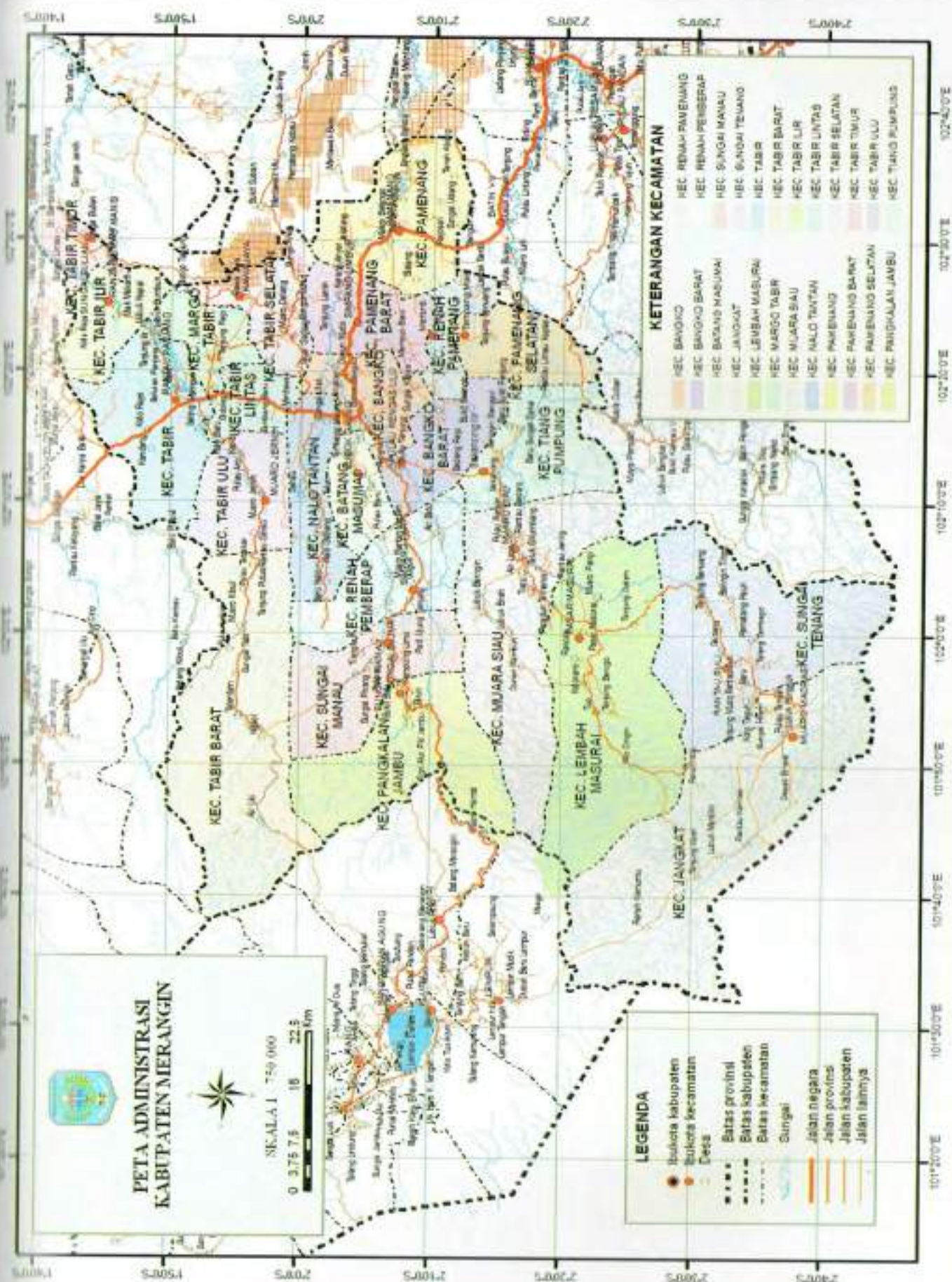
BUPATI KABUPATEN MERANGIN

H. M. Nalim, SH

WAKIL BUPATI KABUPATEN MERANGIN

Drs. Hasan Basri Harun, MM

KABUPATEN MERANGIN





H. M. NALIM, SH
BUPATI KABUPATEN MERANGIN



Drs. HASAN BASRI HARUN, MM
WAKIL BUPATI KABUPATEN MERANGIN



KABUPATEN KERINCI

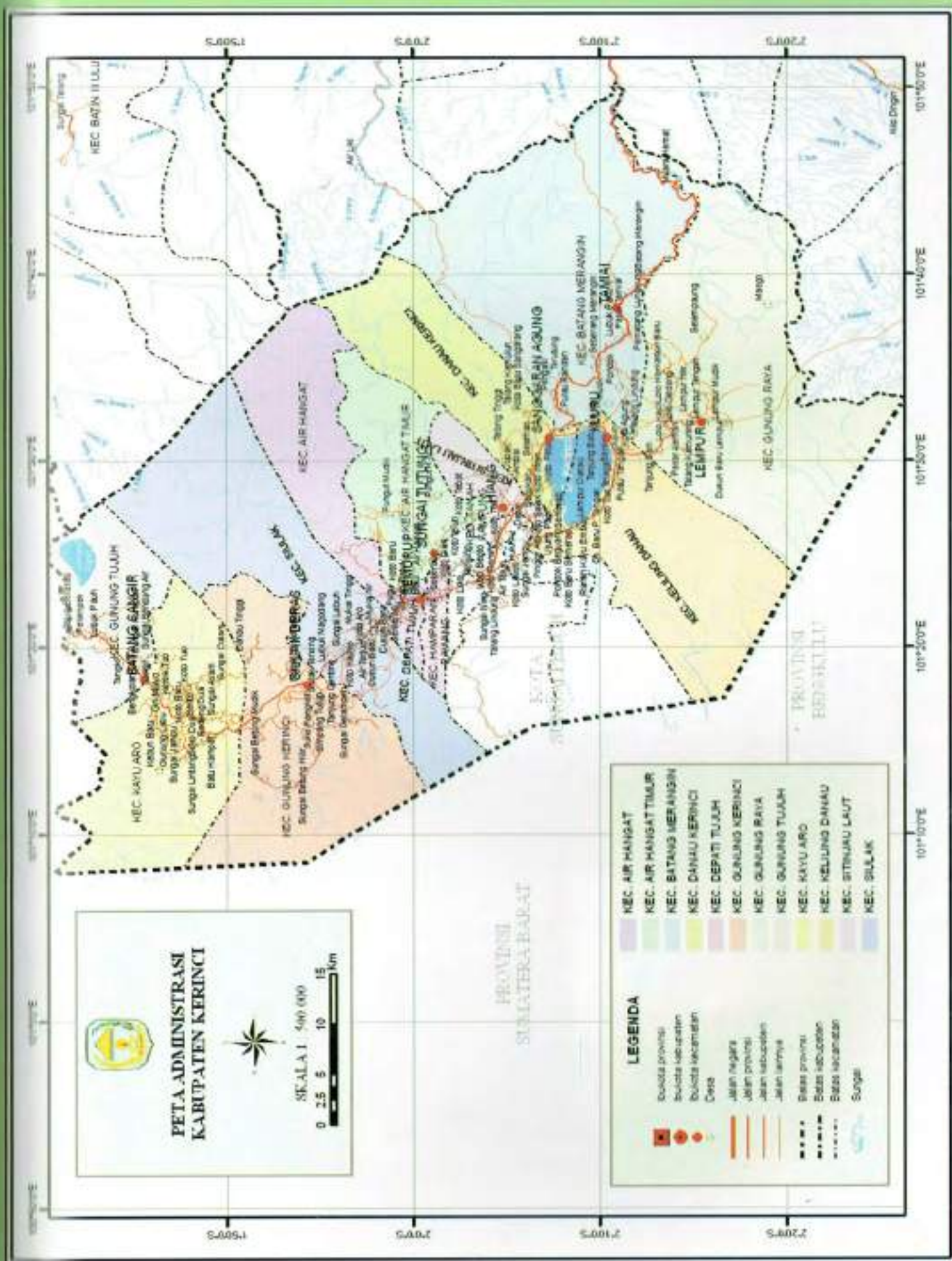
BUPATI KABUPATEN KERINCI

H. Murrasman

WAKIL BUPATI KABUPATEN KERINCI

H. Mohd. Rahman

KABUPATEN KERINCI



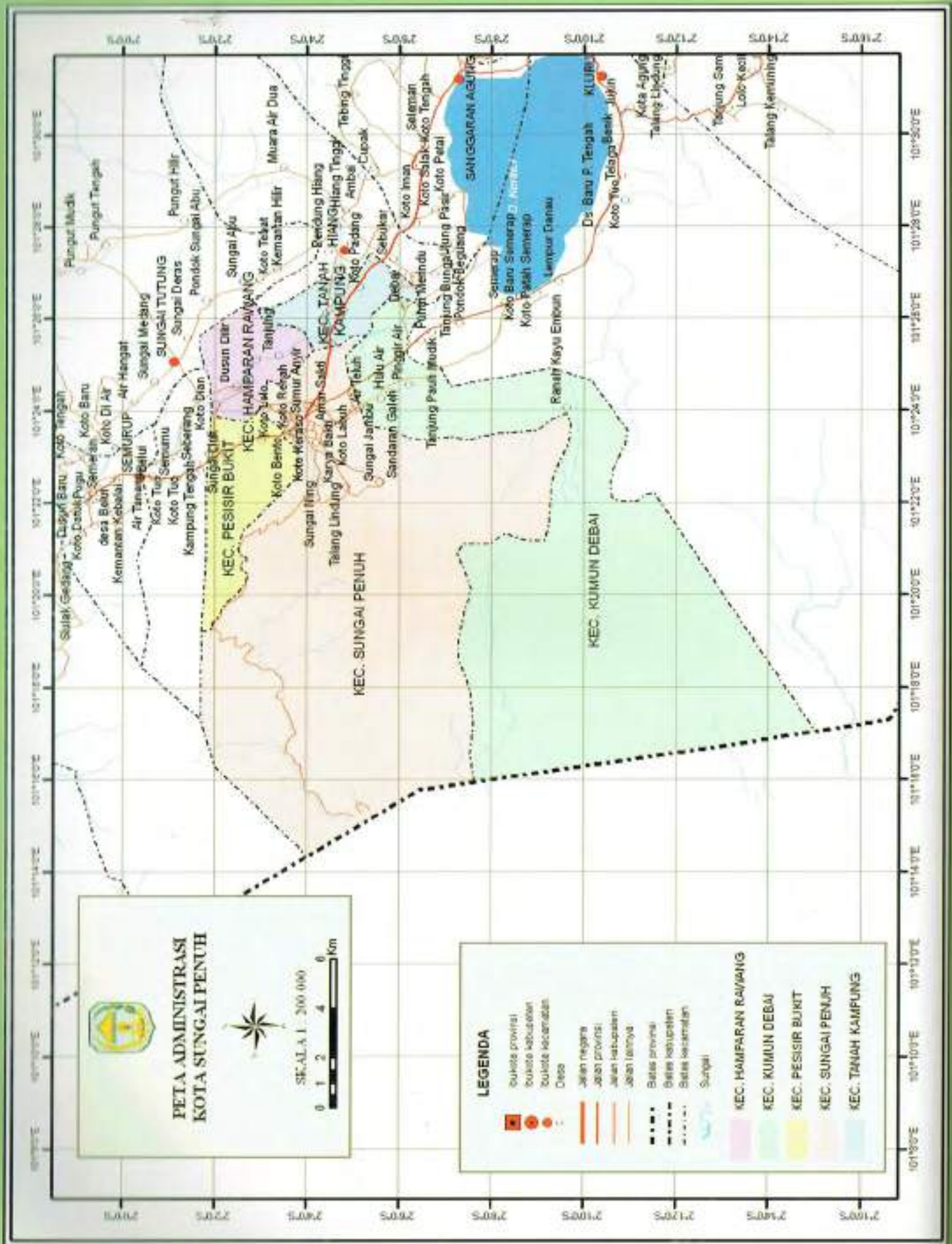


H. MURASMAN
BUPATI KABUPATEN KERINCI



H. MOHD. RAHMAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN KERINCI

KOTA SUNGAI PENUH





MASRIL MUHAMMAD
PEJABAT WALIKOTA SUNGAI PENUH

PEMBAGIAN WILAYAH NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Diawal kemerdekaan Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan dikonsepsikan Provinsi di Indonesia hanya terdiri atas :

- a. Provinsi Sumatera
- b. Provinsi Jawa Barat
- c. Provinsi Jawa Tengah
- d. Provinsi Jawa Timur
- e. Provinsi Sunda Kecil
- f. Provinsi Maluku
- g. Provinsi Sulawesi
- h. Provinsi Kalimantan

Dengan UU No. 1 Tahun 1950, tentang Pembagian Wilayah Indonesia dinyatakan Indonesia terdiri dari 26 Provinsi, dan menurut UU No. 5 Tahun 1974 Daerah Provinsi adalah Daerah Tingkat I dibawahnya ada Daerah Tingkat II yang berupa Kabupaten dan Kotamadya. Setelah itu Tahun 1976 Timor Timur bergabung dengan RI, maka dengan demikian akhirnya jumlah provinsi di Indonesia menjadi 27 Provinsi.

Berkat ulah Fretelin yang didukung Portugal dan Australia kemudian Timor Timur berkembang menjadi issue internasional ditahun 1999 / 2000 hingga tak pelak lagi walau masih cukup besar kekuatan yang tetap setia pada NKRI akhirnya Timor Timur terpaksa dilepas dari NKRI pada masa pemerintahan Presiden Prof. DR. Ing. H. B.J. Habibie sehingga kemudian jumlah provinsi di Indonesia kembali menjadi 26 Provinsi.

Seiring Era Reformasi sistem pemerintahan yang semula sentralistis kemudian berubah menjadi desentralisasi yang lebih demokratis. Maka keluarlah UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Azas otonomi menurut UU ini kemudian disempurnakan menjadi UU No.31 dan 32 Tahun 2004, adalah otonomi seluas-luasnya, daerah diberikan hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dampak positif yang ditimbulkan maka bermunculanlah daerah otonomi baru yang merupakan pemekaran wilayah dari daerah yang ada oleh karena alasan budaya, letak geografis, dll. Jadi kini wilayah Indonesia terbagi dalam 33 Provinsi, 356 kabupaten, dan 89 kota dengan kemungkinan masih bisa bertambah lagi.

Provinsi-provinsi baru yang melengkapi Indonesia menjadi 33 Provinsi diantaranya adalah :

- a. Provinsi Banten
- b. Provinsi Maluku Utara
- c. Provinsi Gorontalo
- d. Provinsi Kep. Riau
- e. Provinsi Bangka Belitung
- f. Provinsi Papua
- g. Provinsi Irian Jaya Barat
- h. Provinsi Sulawesi Barat

PROVINSI - PROVINSI DI NKRI

1. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Semula bernama Daerah Istimewa Aceh, dibentuk berdasarkan UU No.24 Tahun 1956, tanggal 7 Desember 1959. Di era reformasi untuk memberikan otonomi khusus selain juga untuk meredam gejolak separatisme daerah, maka pada tahun 2001 diubahlah nama provinsinya menjadi Nangroe Aceh Darussalam.

Adapun gerakan separatistis yang memproklamirkan diri Aceh Merdeka pada tanggal 10 Juni 1977 ini kemudian dinamakan Gerakan Aceh Merdeka yang akhirnya berhasil juga ditumpas oleh ABRI dengan diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM), walau tokoh maupun aktivisnya ada yang lari keluar negeri.

Luas wilayah Provinsi NAD $\pm$ 57.365 Km² dengan ibu kota semula Kutaraja berubah Banda Aceh. Provinsi ini terdiri atas 21 kabupaten / kota.

Potensi daerah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam :

- 1) Potensi pertanian / argo
Kopi, padi, cengkeh, pala, pinang, karet, kopra, tembakau, getah damar, kedelai, kelapa sawit, kelapa, jagung, tebu, kacang tanah, dan kapok.
- 2) Potensi industri dan tambang
Gas alam, minyak bumi, industri pupuk, emas, kayu lapis, semen, pabrik minyak kelapa, dll.
- 3) Potensi pariwisata
Hutan Wisata Gunung Leuser, Danau Laut Tawar, Taman Laut Sabang, Taman Buru Lingge Isaq, dll.

2. Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara berdiri berdasarkan UU No.24 Tahun 1956 tanggal 7 Desember 1956.

Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara $\pm$ 71.680 Km². Ibu kota Provinsi Sumatera Utara adalah Medan. Kini jumlah kabupaten / kota berkembang menjadi 26 kabupaten / kota

Potensi daerah di Provinsi Sumatera Utara :

- 1) Potensi pertanian / argo
Kopi, karet, kopra, tembakau, kelapa sawit, jagung, kapuk, buah-buahan, sayur-sayuran, dan teh.
- 2) Potensi industri dan tambang
Minyak bumi, pengolahan bauksit di Asahan, industri kayu, kayu lapis, industri ban mobil, pabrik kertas, industri tekstil, dll.
- 3) Potensi pariwisata
Danau Toba, Brastagi, Nias, Sibolangit, Tomok Samosir, dll.

3. Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat berdiri pada tanggal 3 Juli 1958 berdasarkan UU No.61 Tahun 1958.

Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat, adapun luas wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah $\pm$ 42.297 Km². Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 19 kabupaten / kota.

Potensi daerah di Provinsi Sumatera Barat :

- 1) Potensi pertanian / argo
Kelapa, padi, karet, sayur-mayur dan buah-buahan.
- 2) Potensi industri dan tambang
Semen, batu bara, dan pabrik tenun.
- 3) Potensi pariwisata
Danau Singkarak, Ngarai Sianok, Danau Maninjau, dll.

4. Provinsi Riau

Provinsi Riau berdiri tanggal 25 Juli 1958 berdasarkan UU No. 61 Tahun 1958.

Luas wilayah Provinsi Riau $\pm$ 94.561 Km² dan ibu kotanya adalah Pekanbaru. Seiring era reformasi pada tahun 2002 Kabupaten Riau Kepulauan, Kabupaten Karimata, dan kabupaten Natuna atau wilayah yang terkenal sebagai Riau Kepulauan memisahkan diri dari Provinsi Riau, berdiri menjadi Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kini Provinsi Riau tanpa Riau Kepulauan memiliki 11 kabupaten / kota berdasarkan sensus tahun 2000.

Potensi daerah di Provinsi Riau :

- 1) Potensi argo
Kelapa sawit, karet, perikanan, dan hasil hutan.
- 2) Potensi industri dan tambang
Bauksit, pabrik kertas, minyak bumi, dan kayu lapis.
- 3) Potensi pariwisata
Istana Sultan Melayu, dll.

5. Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau merupakan pemisahan dari Provinsi Riau dengan adanya pemekaran wilayah pada tahun 2002.

Provinsi ini berbatasan dengan Negara Singapura, sehingga sedikit banyak banyak pengaruh Singapura terutama di sektor perdagangan. Banyak investor asing yang menaruh minat invest di provinsi ini, terlebih dengan adanya pusat industri Pulau Batam yang merupakan segitiga emas antara Batam-Singapura dan Penang Malaysia, selain itu provinsi ini juga berposisi strategis bagi keamanan nasional dengan wilayah Natuna yang menghadap Laut Cina Selatan.

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau $\pm$ 11.195,52 Km² dengan ibu kota Tanjung Pinang (sementara masih di Batam). Provinsi ini terdiri atas 6 kabupaten / kota.

Potensi daerah di Provinsi Kepulauan Riau :

- 1) Potensi argo
Hasil laut.
- 2) Potensi industri dan tambang
Bauksit, minyak bumi, pusat industri elektronika Batam, pasir laut.
- 3) Potensi pariwisata
Wisata industri / shooping di Batam, wisata entertaint / olah raga main golf, dll.

6. Provinsi Jambi

Provinsi Jambi berdiri pada tanggal 2 Juli 1958 berdasarkan UU. No.61 Tahun 1958.

Luas wilayah Provinsi Jambi $\pm$ 54.436 Km² dengan ibu kota yang juga bernama Jambi. Seiring dengan adanya pemekaran wilayah di era reformasi maka kini jumlah kabupaten / kota di Provinsi Jambi menjadi 11 kabupaten / kota.

Potensi daerah di Provinsi Jambi :

- 1) Potensi pertanian / argo
Kelapa sawit, cengkeh, coklat, dan kelapa.
- 2) Potensi industri dan tambang
Minyak bumi, emas, batu bara, dan kayu lapis.
- 3) Potensi pariwisata
Taman nasional Kerinci, Candi Muara Takus, Candi Tinggi, dll.

7. Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu berdiri pada tanggal 2 September 1967 berdasarkan UU. No.9 Tahun 1967.

Luas wilayah Provinsi Jambi $\pm$ 19.788 Km² dengan ibu kota Bengkulu. Berdasarkan sensus tahun 2000 Bengkulu terdiri atas 9 kabupaten / kota.

Potensi daerah di Provinsi Bengkulu :

- 1) Potensi pertanian / argo
Cengkeh, kemiri, kapuk, lada, coklat, kopi, dan hasil hutan.
- 2) Potensi industri dan tambang
Emas, batu bara, perak, pabrik botol, dll.

- 3) Potensi pariwisata
Taman Nasional Raflesia, Taman Buru Pulau Enggano, dll.

8. Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan berdiri semenjak 14 Agustus 1960 sesuai dengan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU) No. 3 Tahun 1960.

Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan $\pm 113.339 \text{ Km}^2$ dengan ibu kota Palembang. Dengan terjadinya pemekaran daerah, Kabupaten Bangka Belitung memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi sendiri sehingga lahir kabupaten / kota baru. Kini sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2003, Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 14 kabupaten / kota.

Potensi daerah di Provinsi Sumatera Selatan :

- 1) Potensi argo
Kopi, lada, nanas, cengkeh, karet, dan kelapa.
- 2) Potensi industri dan tambang
Minyak bumi, batu bara, dan pupuk.
- 3) Sektor pariwisata
Binatang tapir, gajah, sungai musi, dll.

9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdiri semenjak bulan November 2001. Provinsi ini merupakan pemisahan dari Provinsi Sumatera Selatan.

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung $\pm 95,1 \text{ Km}^2$ dengan ibu kota Pangkal Pinang. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas 7 kabupaten / kota.

Potensi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

- 1) Potensi argo
Cengkeh, lada, dan hasil laut.
- 2) Potensi industri dan tambang
Timah dan pasir kwarsa.
- 3) Potensi pariwisata
Wisata laut, dll.

10. Provinsi Lampung

Provinsi Lampung berdiri tanggal 13 Februari 1964 berdasarkan UU No.14 tahun 1964.

Luas wilayah Provinsi Lampung $\pm 35.376,84 \text{ Km}^2$ dengan ibu kota Bandar Lampung. Provinsi Lampung terdiri atas 10 kabupaten / kota berdasarkan sensus tahun 2000.

Potensi daerah di Provinsi Lampung :

- 1) Potensi argo / pertanian
Kopi, lada, kelapa, kelapa sawit, cengkeh, pisang, tembakau, hasil hutan, dll.
- 2) Potensi industri dan tambang
Emas, industri gula, dan kawasan industri.
- 3) Potensi pariwisata
Taman Hutan Nasional, Pelestarian Gajah Way Kambas, dll.

11. Provinsi Banten

Provinsi Banten baru berdiri tahun 2000 setelah era reformasi dan merupakan sempalan dari Provinsi Jawa Barat.

Luas wilayah Provinsi Banten $\pm 8.234,69 \text{ Km}^2$ dengan ibu kota Serang. Provinsi ini terdiri atas 6 kabupaten / kota.

Potensi daerah di Provinsi Banten :

- 1) Potensi argo / pertanian
Kelapa, cengkeh, padi, melinjo, durian, perikanan, dll.
- 2) Potensi industri dan tambang
Minyak bumi, pabrik baja, emas, tekstil, kawasan industri.
- 3) Potensi pariwisata
Taman Wisata dan Cagar Alam Ujung Kulon, wisata pantai, wisata budaya (peninggalan sejarah Banten).

12. Provinsi DKI Jakarta

Provinsi Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta berdiri tanggal 10 Februari 1961 berdasarkan UU No. 1 tahun 1961.

Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta $\pm 661,62 \text{ Km}^2$ dengan ibu kota Jakarta. Nama DKI pada provinsi ini adalah status khusus sebagai ibu kota negara dan status ini diberikan atas kebijaksanaan langsung presiden. Hal khusus lainnya yang membedakan status provinsi ini dengan provinsi lain adalah provinsi ini tidak membawahi daerah otonom baik kabupaten maupun kota.

Provinsi DKI Jakarta meliputi 6 kota administratif diantaranya adalah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu.

Potensi daerah di Provinsi DKI Jakarta :

- 1) Potensi argo / pertanian
Peternakan ayam, peternakan babi, dll.
- 2) Potensi industri dan tambang
Pabrik tekstil, kawasan industri, pabrik pengolahan pangan, dan pabrik pengolahan pangan.
- 3) Potensi pariwisata
Pantai Wisata Ancol, pusat hiburan anak, Sea World, Kebun Binatang Ragunan, Istana Negara, TMII, Monas, Museum Pusat, dll.

13. Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat berdiri tanggal 14 Juli 1950 berdasarkan UU No.11 tahun 1950.

Luas wilayah Provinsi Jawa Barat $\pm 44.176 \text{ Km}^2$ dengan ibu kota Bandung. Berdasarkan sensus tahun 2000 provinsi ini terdiri atas 24 kabupaten / kota.

Potensi daerah di Provinsi Jawa Barat :

- 1) Potensi argo / pertanian
Teh, palawija, karet, padi, buah-buahan, dan sayur-mayur.
- 2) Potensi industri dan tambang
Gas alam, minyak bumi, emas, industri semen, industri perikanan darat, industri tekstil, dll.
- 3) Potensi pariwisata
Istana Bogor / Cipanas, Puncak, Taman Safari, wisata laut, Suaka Margasatwa Pangandaran, dan Wisata Alam Marabaya.

14. Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah berdiri tanggal 4 Juli 1950 berdasarkan UU No.70 tahun 1950.

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah $\pm 33.171,88 \text{ Km}^2$ dengan ibu kota Semarang. Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 35 kabupaten / kota.

Potensi daerah di Provinsi Jawa Tengah :

- 1) Potensi argo / pertanian
Padi, tembakau, karet, kopi, teh, kayu jati, kelapa, jagung, jambu mete, tebu, vanili, sayur-sayuran, buah-buahan, perikanan laut / darat.

- 2) Potensi industri dan tambang
Minyak bumi, aneka industri kerajinan, industri rokok, tekstil, semen, industri meubel / garden ukir, kawasan industri, dll.
- 3) Potensi pariwisata
Wisata budaya, wisata pantai, wisata alam, Candi Borobudur, dll.

15. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berdiri tanggal 4 Maret 1950 berdasarkan UU No. 3 tahun 1950.

Luas wilayah Provinsi DIY + 3.142 Km² dengan ibu kota Yogyakarta. Provinsi ini terdiri atas 5 kabupaten / kota. Provinsi DIY terdiri atas 5 kabupaten / kota.

Potensi daerah di Provinsi DIY :

- 1) Potensi argo / pertanian
Kelapa, jagung, ubi kayu, jembu mete, dan melinjo.
- 2) Potensi industri dan tambang
Industri batik, industri perak, industri keramik, industri kecil (cinderamata), dan kerajinan tangan.
- 3) Potensi pariwisata
Istana Negara / Gedung Agung, Keraton, Parang Tritis, Kaliurang, dll.

16. Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur berdiri tanggal 4 Maret 1950 berdasarkan UU No. 2 tahun 1950.

Luas wilayah Provinsi Jawa Timur + 47.921,98 Km² dengan ibu kota Surabaya. Provinsi ini terdiri atas 38 kabupaten / kota. Provinsi Jawa Timur terdiri atas 38 kabupaten / kota.

Potensi daerah di Provinsi Jawa Timur :

- 1) Potensi argo / pertanian
Padi, tembakau, cengkeh, jambu mete, jagung, tebu, buah-buahan, dan sayur-mayur.
- 2) Potensi industri dan tambang
Industri perikanan, industri rokok, kompleks industri kecil, kertas, lingkungan industri besar, minyak bumi, marmer, dll.
- 3) Potensi pariwisata
Wisata Alam Bromo / Tengger, Suaka Margasatwa Meru Bethiri, karapan sapi, wisata alam pegunungan, wisata alam pantai, dll.

17. Provinsi Bali

Provinsi Bali berdiri tanggal 14 Agustus 1958. Provinsi Bali merupakan tujuan wisata internasional, dengan daya tarik adat istiadat dan budaya, serta keindahan alamnya.

Luas wilayah Provinsi Bali + 5.632,86 Km² dengan ibu kota Denpasar. Provinsi ini terdiri atas 9 kabupaten / kota berdasarkan sensus tahun 2000.

Potensi daerah di Provinsi Bali :

- 1) Potensi argo / pertanian
Padi, kelapa, jagung, pisang, tembakau, buah-buahan, dan peternakan.
- 2) Potensi industri dan tambang
Pengolahan industri perikanan, peternakan, hasil seni, industri rakyat, dll.
- 3) Potensi pariwisata
Wisata alam, laut / pantai, Istana tapaksiring, Kuta, Bedugul, wisata budaya, Puri Besakih, dll.

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat berdiri tanggal 14 Agustus 1958 berdasarkan

UU. No.64 tahun 1958.

Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat $\pm 20.153,15 \text{ Km}^2$ dengan ibu kota Mataram. Provinsi ini terdiri atas 9 kabupaten / kota berdasarkan sensus tahun 2000.

Potensi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat :

- 1) Potensi argo / pertanian
Coklat, jambu mete, kapas, cengkeh, tembakau, pisang, dan tebu.
- 2) Potensi industri dan tambang
Emas, perak, dan kerang mutiara.
- 3) Potensi pariwisata
Taman Wisata Cakranegara, Suaka Alam Moyo, dan Wisata Pantai Sengigi.

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur berdiri tanggal 14 Agustus 1958 berdasarkan UU. No.64 tahun 1958.

Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur $\pm 47.349 \text{ Km}^2$ dengan ibu kota Kupang. Provinsi ini terdiri atas 16 kabupaten / kota berdasarkan sensus tahun 2000.

Potensi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur :

- 1) Potensi argo / pertanian
Cengkeh, jambu mete, kopi, kemiri, kayu cendana, coklat, tembakau, peternakan lembu dan kuda.
- 2) Potensi industri dan tambang
Semen dan mangan.
- 3) Potensi pariwisata
Wisata Alam Pulau Komodo, Danau Kelimutu, dan Ende.

20. Provinsi Kalimantan Barat

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat $\pm 14.680 \text{ Km}^2$ dengan ibu kota Pontianak. Provinsi ini terdiri atas 12 kabupaten / kota berdasarkan sensus tahun 2000.

Potensi daerah di Provinsi Kalimantan Barat :

- 1) Potensi argo / pertanian
Coklat, karet, kopi, jambu mete, dan kelapa sawit.
- 2) Potensi industri dan tambang
Kayu lapis, emas, dan minyak bumi.
- 3) Potensi pariwisata
Suaka Alam Lopatfunpi Singkawang dan Taman Anggrek Pontianak.

21. Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah berdiri tanggal 2 Juli 1958 berdasarkan UU. No.21 tahun 1958.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah $\pm 153.800 \text{ Km}^2$ dengan ibu kota Palangkaraya. Provinsi ini terdiri atas 14 kabupaten / kota berdasarkan sensus tahun 2000.

Potensi daerah di Provinsi Kalimantan Tengah :

- 1) Potensi argo / pertanian
Karet, kopi, cengkeh, lada, dan kelapa sawit.
- 2) Potensi industri dan tambang
Kayu lapis, batu bara, emas, dan perak.
- 3) Potensi pariwisata
Suaka Alam Parawan I dan II di Barito Utara.

22. Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan berdiri tanggal 7 Desember 1956 berdasarkan UU. No.25 tahun 1956.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan $\pm$ 37.377 Km² dengan ibu kota Banjarmasin. Provinsi ini terdiri atas 13 kabupaten / kota berdasarkan sensus tahun 2000.

Potensi daerah di Provinsi Kalimantan Selatan :

- 1) Potensi argo / pertanian
Kelapa sawit, cengkeh, karet, jambu mete, kayu manis, lada, dan kapuk.
- 2) Potensi industri dan tambang
Kayu lapis, anyaman rotan, minyak bumi, batu bara, dan intan.
- 3) Potensi pariwisata
Suaka Margasatwa Tanah Laut, Pleihari, Penggosokan Batu Mulia Martapura, dan Padang Lauwi.

23. Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur berdiri tanggal 7 Desember 1956 berdasarkan UU. No.25 tahun 1956.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur $\pm$ 211.440 Km² dengan ibu kota Samarinda. Provinsi ini terdiri atas 14 kabupaten / kota berdasarkan sensus tahun 2000.

Potensi daerah di Provinsi Kalimantan Timur :

- 1) Potensi argo / pertanian
Kelapa, cengkeh, lada, kelapa sawit, dan kopi.
- 2) Potensi industri dan tambang
Minyak bumi, gas alam, batu bara, pabrik pupuk, kayu lapis, dan perikanan.
- 3) Potensi pariwisata
Taman Anggrek Kersik, Luway Kutai, dan Wisata Hutan Manggar.

24. Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara berdiri tanggal 13 Desember 1960 berdasarkan UU. No.47 tahun 1960.

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara $\pm$ 25.768 Km² dengan ibu kota Manado. Provinsi ini terdiri atas 9 kabupaten / kota berdasarkan sensus tahun 2000.

Potensi daerah di Provinsi Sulawesi Utara :

- 1) Potensi argo / pertanian
Cengkeh, kelapa, coklat, dan kopi.
- 2) Potensi industri dan tambang
Emas dan industri perikanan laut.
- 3) Potensi pariwisata
Taman Laut Bunaken, Suaka Alam dan hutan.

25. Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo berdiri tanggal 15 Februari 2001.

Luas wilayah Provinsi Gorontalo $\pm$ 10.804 Km² dengan ibu kota Gorontalo. Provinsi ini terdiri atas 5 kabupaten / kota berdasarkan sensus tahun 2000.

Potensi daerah di Provinsi Gorontalo :

- 1) Potensi argo / pertanian
Cengkeh, kelapa, coklat, kopi, dan perikanan.
- 2) Potensi tambang
Emas.
- 3) Potensi pariwisata
Wisata alam pantai.

26. Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah berdiri tanggal 23 September 1964 berdasarkan UU. No.13 tahun 1964.

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah + 68.033 Km² dengan ibu kota Palu. Provinsi ini terdiri atas 10 kabupaten / kota berdasarkan sensus tahun 2000.

Potensi daerah di Provinsi Sulawesi Tengah :

- 1) Potensi argo / pertanian
Cengkeh, kelapa, karet, lada, tebu, hasil hutan, dan perikanan.
- 2) Potensi industri dan tambang
Emas, biji besi, pengolahan hasil perikanan dan peternakan.
- 3) Potensi pariwisata
Suaka Margasatwa, Suaka Alam, Taman Buru Landuga, Tomata, Poso.

27. Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Tenggara berdiri tanggal 22 September 1964 berdasarkan UU. No.13 tahun 1964.

Luas wilayah Provinsi ini + 38.140 Km² dengan ibu kota Kendari, dan terdiri atas 10 kabupaten / kota berdasarkan sensus tahun 2000.

Potensi daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara :

- 1) Potensi argo / pertanian
Coklat, jambu mete, kelapa, tembakau, dan tebu.
- 2) Potensi industri dan tambang
Aspal dan nikel.
- 3) Potensi pariwisata
Taman Nasional Taman Aopa Dataran Rumbia, dan Taman Nasional Buton.

28. Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan berdiri tanggal 13 Desember 1960 berdasarkan UU. No.47 tahun 1960.

Luas wilayah Provinsi ini + 62.482,54 Km² dengan ibu kota Makassar, terdiri atas 23 kabupaten / kota berdasarkan sensus tahun 2000.

Potensi daerah di Provinsi Sulawesi Selatan :

- 1) Potensi argo / pertanian
Cengkeh, coklat, jambu mete, karet, kemiri, kopi, kapuk, lada, dan markisa.
- 2) Potensi industri dan tambang
Minyak bumi, batu bara, emas, nikel, semen, dan pengolahan perikanan.
- 3) Potensi pariwisata
Wisata Budaya Tanah Toraja, Wisata Alam, dan Wisata Pantai / Laut.

29. Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan UU. No.7 tahun 2003.

Luas wilayah Provinsi ini + 16.286,95 Km² dengan ibu kota Majene, terdiri atas 6 kabupaten / kota berdasarkan sensus tahun 2000.

Potensi daerah di Provinsi Sulawesi Barat :

- 1) Potensi argo
Kelapa, cengkeh, kopi, jambu mete, kapuk, pala, dan sayur-sayuran.
- 2) Potensi industri dan tambang
Perikanan laut.

